

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGANYAR

**Ratna Ayu Wijayanti**

*Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia*

*Email Korespondensi: 21011010094@student.upnjatim.ac.id*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pajak sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, selama periode 2019–2023. Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu *tax contribution*, *tax effectivity*, dan *tax ratio*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata *tax contribution* terhadap PAD Kabupaten Karanganyar masih tergolong sangat rendah, yakni sebesar 2,01% untuk pajak hotel, 2,50% untuk pajak restoran, dan 0,25% untuk pajak hiburan. Dari sisi efektivitas, nilai *tax effectivity* ketiga jenis pajak tersebut juga belum optimal, dengan capaian masing-masing sebesar 1,61%, 1,90%, dan 0,22%. Sementara itu, indikator *tax ratio* justru menunjukkan potensi yang cukup besar, yakni 31,23% untuk pajak hotel, 38,78% untuk pajak restoran, dan 3,91% untuk pajak hiburan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aktivitas ekonomi di sektor pariwisata memiliki potensi tinggi, kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih belum maksimal.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Tax Contribution, Tax Effectivity, Tax Ratio, Pendapatan Asli Daerah

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial performance of tourism sector taxes in Karanganyar Regency, which includes hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax, during the period 2019–2023. The assessment of financial performance is conducted using three main indicators: tax contribution, tax effectivity, and tax ratio. This research adopts a descriptive quantitative approach by processing secondary data sourced from local tax revenue realization reports and Regional Original Revenue (PAD) data. The results show that the average tax contribution to Karanganyar's PAD remains in the very low category, with hotel tax at 2.01%, restaurant tax at 2.50%, and entertainment tax at only 0.25%. In terms of effectiveness, the tax effectivity of these three taxes is still far from optimal, with an average of 1.61% for hotel tax, 1.90% for restaurant tax, and 0.22% for entertainment tax. However, the tax ratio indicator reveals a promising economic potential, with hotel tax at 31.23%, restaurant tax at 38.78%, and entertainment tax at 3.91%. This indicates that despite the strong economic activity in the tourism sector, its contribution to local revenue has yet to be maximized.*

**Keywords:** Local Tax, Tax Contribution, Tax Effectivity, Tax Ratio, Regional Original Revenue,

## PENDAHULUAN

*Tourism*, di mana sasaran utama bukan lagi wisatawan perorangan, melainkan kelompok atau rombongan besar. Lonjakan kunjungan wisatawan dalam jumlah besar menciptakan kebutuhan akan fasilitas istirahat, menjadikan industri perhotelan sebagai salah satu infrastruktur utama dalam dunia kepariwisataan—sering disebut sebagai *main tourism superstructures* (Kamaru *et al.* 2017). Industri perhotelan berperan sebagai pilar penting dalam pengembangan sektor pariwisata dan dijalankan dengan orientasi komersial (Hermawan *et al.* 2018). Fasilitas yang ditawarkan hotel seperti kamar serta layanan makanan dan minuman menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menjadikannya tempat persinggahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dasar wisatawan meliputi tempat beristirahat, makanan, dan minuman (Sammeng, 2001).

Oleh karena itu, keberadaan restoran sebagai penyedia layanan makanan dan minuman turut berperan dalam menarik pengeluaran wisatawan. Bahkan, kuliner kerap menjadi daya tarik utama tujuan wisata itu sendiri (Putri *et al.* 2016). Wisatawan sering kali terdorong mengunjungi suatu daerah karena ketertarikan pada sajian khas setempat, yang berarti motivasi perjalanan mereka tidak lepas dari unsur kuliner. Sebaliknya, keberlangsungan dan perkembangan restoran juga bergantung pada aktivitas pariwisata, membentuk hubungan saling menguntungkan antara keduanya. Pertumbuhan industri pariwisata juga membawa pengaruh nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat (Shantika dan Mahagganga, 2018). Salah satu bentuk kontribusinya tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha atas aktivitas yang memanfaatkan fasilitas negara, dan hasilnya digunakan untuk mendukung kepentingan umum, bukan keuntungan pribadi.

Industri yang mendukung sektor pariwisata secara signifikan dapat meningkatkan PAD melalui berbagai jenis pajak, seperti pajak hiburan, pajak perhotelan, dan pajak restoran. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang menunjukkan komitmen dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Upaya tersebut tercermin dari eksplorasi berbagai destinasi wisata alam dan budaya, seperti Grojogan Sewu, Candi Cetho, serta kebun teh Kemuning. Selain mengandalkan kekayaan alam dan warisan budaya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga aktif menyelenggarakan berbagai event budaya dan pariwisata sebagai bentuk penguatan strategi promosi destinasi wisata daerah. Peningkatan aktivitas wisata tentunya berdampak langsung pada sektor usaha yang terkait, terutama perhotelan, restoran, dan hiburan. Hal ini tercermin dari capaian penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karanganyar tahun 2022, realisasi pajak hotel mencapai Rp11 miliar, pajak restoran mencapai Rp13 miliar, dan pajak hiburan sebesar Rp1 miliar. Jumlah tersebut mencerminkan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama pendapatan daerah.

Meskipun kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun potensi yang dimiliki Kabupaten Karanganyar diyakini masih belum tergali secara maksimal. Beberapa permasalahan seperti belum optimalnya pendataan objek pajak, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak menjadi tantangan tersendiri

dalam meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mendalam terkait kinerja keuangan pajak sektor pariwisata untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, serta sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan PAD. Analisis ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran. Kinerja keuangan pajak dapat menjadi alat evaluasi terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan. Selain itu, dengan adanya data dan evaluasi yang akurat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret guna meningkatkan kinerja pajak pariwisata, baik melalui peningkatan pelayanan, sistem digitalisasi perpajakan, hingga penguatan pengawasan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pajak dari sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar dan mengevaluasi kontribusinya terhadap PAD. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai potensi, permasalahan, serta strategi optimalisasi pajak sektor pariwisata sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

### Analisis Kinerja Keuangan (Value for Money)

Konsep *value for money* dalam analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi pemerintah mampu menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, serta mengendalikan biaya secara efisien. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya (input) dengan biaya serendah mungkin, tanpa mengorbankan kualitas layanan, sehingga penyelenggaraan kegiatan publik dapat berjalan optimal (Boisclair, 2008). Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis data keuangan guna mengukur kinerja penerimaan pajak dari sektor pariwisata. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan *value for money*, yang mencakup empat elemen utama, yaitu: *economic ratio*, *tax effort*, *tax effectiveness*, dan *tax efficiency*.

### Tax Contribution

Analisis kontribusi pajak bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak dari sektor pariwisata—meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan—terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu yang menggambarkan persentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap keseluruhan PAD. Untuk menilai tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD, digunakan beberapa kriteria tertentu yang dapat menunjukkan apakah kontribusinya tergolong tinggi, sedang, atau rendah. Kriteria ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sektor pariwisata mampu menyokong keuangan daerah melalui penerimaan pajak.

$$KONTRIBUSI = \frac{REALISASI PAJAK}{PAD} \times 100\%$$

### Tax Effectiveness

Sementara itu, *tax effectiveness* digunakan untuk menilai seberapa efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target atau rencana penerimaan pajak dalam satu periode tertentu. Nilai *tax effectiveness* yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah mampu merealisasikan atau bahkan melampaui target penerimaan yang direncanakan. Sebaliknya, jika nilainya rendah, hal tersebut dapat menjadi indikator adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, mulai dari perencanaan yang tidak akurat, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, indikator ini sangat relevan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana target penerimaan pajak telah tercapai secara efektif.

$$EFEKTIVITAS = \frac{REALISASI PAJAK}{TARGET PAJAK} \times 100\%$$

### Tax Ratio

*Tax ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi total penerimaan pajak daerah terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dalam satu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi di suatu daerah dapat menjadi sumber penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai *tax ratio*, maka semakin besar pula kontribusi sektor ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah, yang berarti kapasitas fiskal daerah berada dalam kondisi yang kuat. Sebaliknya, *tax ratio* yang rendah mencerminkan bahwa potensi ekonomi daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan pajak.

Indikator ini penting digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah secara menyeluruh, karena mencerminkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan melalui sistem perpajakan. Dengan demikian, analisis terhadap *tax ratio* dapat memberikan gambaran apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

$$RATIO = \frac{REALISASI PAJAK}{PDRB} \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tax Contribution

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor pariwisata—meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan—terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi selama periode 2009–2019 masih tergolong sangat rendah, yakni berada pada kisaran 0,00% hingga 10%. Berdasarkan rata-rata perhitungan selama periode tersebut, kontribusi pajak hotel tercatat sebesar 2,01%, pajak restoran sebesar 2,50%, dan pajak hiburan hanya sebesar 0,25%. Ketiga jenis pajak ini, meskipun berasal dari sektor yang cukup potensial, masih masuk dalam kategori kontribusi yang sangat kurang terhadap total PAD. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dari sektor pariwisata masih belum sepenuhnya tercapai dan perlu ditingkatkan agar mampu memberikan sumbangan yang lebih signifikan bagi keuangan daerah.

Tabel 1. Tax Contribution

RESTORAN			
Rp 387.763.013.239	9.547.614.477,00	2,46%	
Rp 384.682.993.533	7.811.672.136,00	2,03%	
Rp 426.649.591.412	9.663.484.355	2,26%	
Rp 511.737.349.879	13.090.867.738,00	2,56%	
Rp 441.862.394.424	14.097.355.678,00	3,19%	
		<b>2,50%</b>	

  

HIBURAN			
Rp 387.763.013.239	1.209.087.476,00	0,31%	
Rp 384.682.993.533	844.079.253,00	0,22%	
Rp 426.649.591.412	786.654.768	0,18%	
Rp 511.737.349.879	1.154.471.957,00	0,23%	
Rp 441.862.394.424	1.459.258.950,00	0,33%	
		<b>0,25%</b>	

  

HOTEL			
2019	Rp 387.763.013.239	Rp 7.525.118.670	1,94%
2020	Rp 384.682.993.533	Rp 5.751.316.231	1,50%
2021	Rp 426.649.591.412	Rp 6.698.353.446	1,57%
2022	Rp 511.737.349.879	Rp11.397.998.771	2,23%
2023	Rp 441.862.394.424	Rp12.470.590.885	2,82%
		<b>2,01%</b>	

### Tax Effectiveness

Efektivitas dalam konteks perpajakan merujuk pada sejauh mana realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas mengukur pencapaian dari sisi *output* atau hasil akhir, tanpa mempertimbangkan efisiensi biaya maupun proses pelaksanaannya. Berdasarkan perhitungan rata-rata selama periode 2009–2019, tingkat efektivitas pajak sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil yang bervariasi. Rata-rata efektivitas pajak hotel tercatat sebesar 1,61%, pajak restoran sebesar 1,90%, dan pajak hiburan sebesar 0,22%. Ketiga angka tersebut menunjukkan bahwa pencapaian realisasi masih sangat jauh dari target, sehingga dapat dikategorikan sebagai tidak efektif.

Hasil ini menjadi indikator bahwa upaya pengumpulan pajak dari sektor pariwisata belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Rendahnya tingkat efektivitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penetapan target yang terlalu tinggi, lemahnya sistem pengawasan dan penagihan, atau masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tabel 2. Tax Effectiveness

HOTEL				
2019	Rp	387.763.013.239	5.500.000.000,00	1,42%
2020	Rp	384.682.993.533	5.050.000.000,00	1,31%
2021	Rp	426.649.591.412	5.063.684.000,00	1,19%
2022	Rp	511.737.349.879	8.750.000.000,00	1,71%
2023	Rp	441.862.394.424	10.800.000.000,00	2,44%
				<b>1,61%</b>
RESTORAN				
2019	Rp	387.763.013.239	7.500.000.000,00	1,93%
2020	Rp	384.682.993.533	5.700.000.000	1,48%
2021	Rp	426.649.591.412	7.200.000.000	1,69%
2022	Rp	511.737.349.879	9.500.000.000,00	1,86%
2023	Rp	441.862.394.424	11.200.000.000,00	2,53%
				<b>1,90%</b>
HIBURAN				
2019	Rp	387.763.013.239	1.100.000.000,00	0,28%
2020	Rp	384.682.993.533	750.000.000,00	0,19%
2021	Rp	426.649.591.412	750.000.000	0,18%
2022	Rp	511.737.349.879	1.000.000.000,00	0,20%
2023	Rp	441.862.394.424	1.200.000.000,00	0,27%
				<b>0,22%</b>

### Tax Ratio

Secara umum, *tax ratio* digunakan untuk menggambarkan kontribusi penerimaan pajak terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dalam satu periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana aktivitas ekonomi suatu daerah dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata selama periode 2009–2019, *tax ratio* dari pajak sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pajak hotel mencatatkan *tax ratio* sebesar 31,23%, diikuti oleh pajak restoran sebesar 38,78%, dan pajak hiburan sebesar 3,91%. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB melalui penerimaan pajak tergolong cukup tinggi, khususnya pada pajak hotel dan restoran.

Capaian ini mencerminkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, meskipun nilainya relatif tinggi, optimalisasi pemungutan pajak dan pengawasan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar kontribusi sektor ini dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 3. Tax Ratio

HOTEL			
2019	7.525.118.670,00	26641186000	28,25%
2020	5.751.316.231,00	26103228000	22,03%
2021	6.698.353.446,00	27039607001	24,77%
2022	11.397.998.771,00	28624989001	39,82%
2023	12.470.590.885,00	30208236000	41,28%
			<b>31,23%</b>
HIBURAN			
2019	1.209.087.476,00	26641186000	4,54%
2020	844.079.253,00	26103228000	3,23%
2021	786.654.768	27039607001	2,91%
2022	1.154.471.957,00	28624989001	4,03%
2023	1.459.258.950,00	30208236000	4,83%
			<b>3,91%</b>
RESTORAN			
2019	9.547.614.477,00	26641186000	35,84%
2020	7.811.672.136,00	26103228000	29,93%
2021	9.663.484.355	27039607001	35,74%
2022	13.090.867.738,00	28624989001	45,73%
2023	14.097.355.678,00	30208236000	46,67%
			<b>38,78%</b>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pajak sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar selama periode 2019–2023. Kinerja keuangan pajak sektor pariwisata yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu *tax contribution*, *tax effectivity*, dan *tax ratio*. Hasil perhitungan *tax contribution* menunjukkan bahwa kontribusi pajak sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar masih berada dalam kategori sangat kurang. Selama periode 2019–2023, rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 2,01%, pajak restoran sebesar 2,50%, dan pajak hiburan hanya sebesar 0,25%. Nilai ini menandakan bahwa meskipun sektor pariwisata berkembang, sumbangsihnya terhadap PAD belum signifikan. Dari sisi efektivitas, *tax effectivity* pajak sektor pariwisata juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 1,61%, restoran sebesar 1,90%, dan hiburan sebesar 0,22%. Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori tidak efektif. Sementara itu, indikator *tax ratio* menunjukkan potensi ekonomi sektor pariwisata yang cukup menjanjikan. Rata-rata *tax ratio* untuk pajak hotel mencapai 31,23%, pajak restoran sebesar 38,78%, dan pajak hiburan sebesar 3,91%. Tingginya *tax ratio* ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata di

Kabupaten Karanganyar memiliki peran penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi dan efektivitas penerimaan pajaknya terhadap PAD. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak sektor ini, agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hermawan, H., Brahmanto, E., dan Faizal, H. (2018). Pengantar Manajemen Hospitality. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Kamaru, B., Sarah, S., dan Arpi, R. (2017). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2(2):2-10.
- Mukti, M dan Silviana, D. (2019). Hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Banyuwangi terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*. 3(1): 33-48.
- Putri, A. A., Widi, S., dan Rachmadi, N. (2016). Taman Wisata Kuliner dengan Pendekatan Arsitektur Metafora di Kota Surabaya. *Jurnal Arsitektural*. 14(2): 1-5.
- Sammeng, Andi Mappi. (2001). *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shantika, B. dan Mahagganga, I. G. A. O. 2018. *Dampak Perkembangan*